

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian, baik secara nasional maupun regional (Eko dan Sri, 2020). Pengembangan industri pariwisata memerlukan keseimbangan antara peningkatan jumlah wisatawan dan memastikan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi (Putra dan Sudana, 2021). Pertumbuhan industri ini akan memerlukan pengembangan manajemen destinasi pariwisata secara berkelanjutan, sehingga destinasi tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan sambil mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan (Putra dan Sudana, 2021). Dalam hal ini, keberlanjutan memerlukan partisipasi semua sektor dalam pengelolaan destinasi (Putra dan Sudana, 2021).

Surabaya merupakan salah satu kota terbesar dengan sejarah panjang komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, yang diwujudkan melalui pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dan kawasan ekowisata (Andriyani, 2023). Salah satu contohnya adalah Hutan Raya Balas Klumprik di Kecamatan Wiyung. Kawasan ini berpotensi menjadi paru-paru kota dan juga dapat menyediakan kesempatan pendidikan dan rekreasi bagi wisatawan kota (D. Nugroho *et al.*, 2024). Hutan Raya Balas Klumprik merupakan contoh baik bagaimana perlindungan lingkungan dan pariwisata kota dapat bekerja sama. Wilayah ini memiliki vegetasi alam yang kaya dan fasilitas seperti jalur refleksi, area pendidikan lingkungan, dan taman bertema (D. Nugroho *et al.*, 2024).

Pengelolaan destinasi wisata berbasis alam seperti Hutan Raya Balas Klumprik membutuhkan koordinasi dan sinergi antar berbagai pihak. Menurut teori pengelolaan pariwisata, *stakeholder* terdiri dari pemerintah, masyarakat, sektor bisnis, dunia akademis, dan organisasi non-pemerintah (Uhai *et al.*, 2024). Setiap kelompok memainkan peran yang berbeda sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya (Rachmawati *et al.*, 2020). Pemerintah daerah bertanggung jawab atas regulasi aturan dan pembentukan kebijakan (Rachmawati *et al.*, 2020). Masyarakat merupakan aktor utama dan penerima manfaat, sementara sektor swasta dapat menjadi mitra strategis dalam aspek investasi dan penciptaan produk pariwisata baru (Fajri dan Fatticia, 2025). Pencegahan tumpang tindih wewenang, manajemen yang buruk, dan memastikan rasa tanggung jawab untuk kesuksesan jangka panjang semua pihak yang terlibat dalam destinasi melalui pembentukan kemitraan ini adalah yang membuat kemitraan ini begitu penting (Suryani & Haris, 2022).

Keterlibatan berbagai pihak tersebut sejalan dengan pendekatan pentahelix dalam pengelolaan pariwisata (Muharis *et al.*, 2024). Konsep pentahelix menekankan pentingnya kolaborasi antara lima unsur utama, yaitu pemerintah, masyarakat, sektor bisnis, akademisi, dan media dalam mendukung pengembangan destinasi wisata (Muharis *et al.*, 2024). Akademisi berperan melalui kegiatan penelitian serta pengembangan konsep pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, sedangkan media berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi dan promosi destinasi wisata kepada masyarakat luas (Muharis *et al.*, 2024). Melalui kerja sama yang terbangun antar unsur tersebut, pengelolaan

destinasi wisata diharapkan dapat berjalan lebih efektif, transparan, serta mampu menciptakan keberlanjutan lingkungan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar (Putri *et al.*, 2025).

Koordinasi antar sektor selalu menjadi masalah sulit dalam pengelolaan destinasi pariwisata secara praktis (Supriadi & Roedjinandari, 2017). Banyak objek wisata alam di Indonesia menghadapi masalah karena pemiliknya tidak bekerja sama dengan baik, misalnya dalam hal pemeliharaan fasilitas, promosi, dan pemantauan dampak lingkungan (Setiawan & Wibowo, 2022). Dalam konteks pengelolaan Hutan Raya Balas Klumprik, dukungan kebijakan tersebut perlu diikuti dengan mekanisme implementasi yang jelas, transparan, dan berbasis data lingkungan yang akurat. Hal tersebut tidak berjalan optimal jika peran dan tanggung jawab tidak jelas, terutama terkait keberlanjutan ekologi dan kepuasan pengunjung (Rahman & Prasetyo, 2022).

Tingkat keterlibatan masyarakat lokal juga memiliki peran penting dalam pengelolaan destinasi pariwisata (Talib & Usu, 2019). Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari kegiatan yang melindungi lingkungan destinasi, tetapi juga ikut serta dalam proses pemantauan dan implementasi (Siregar, 2021). Penduduk Hutan Raya Balas Klumprik seharusnya menjadi pihak yang merawat hutan dan lingkungannya karena terdapat berbagai kegiatan sosial dan ekonomi yang berlangsung. Program konservasi lingkungan sering menghadapi kesulitan dalam keberlanjutan dan pelaksanaannya jika masyarakat tidak terlibat. Sebaliknya, ketika masyarakat berperan aktif, misalnya melalui kelompok kesadaran pariwisata (Pokdarwis) atau komunitas lingkungan, pengelolaan

destinasi menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal dan memberikan rasa kepemilikan yang kuat bagi masyarakat (Yuliana & Fadhilah, 2023).

Faktor penting lainnya adalah dukungan kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah Kota Surabaya berupaya menjadikan kota ini hijau dan ramah lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan Program Surabaya Hijau dan Bersih serta strategi untuk meningkatkan area hijau di seluruh kota. Namun, implementasi kebijakan di lapangan cukup menantang karena faktor seperti anggaran yang terbatas, birokrasi yang rumit, dan kurangnya koordinasi antar lembaga, meskipun kebijakan tersebut ada (Kusuma & Fitriani, 2022). Oleh karena itu, jika Hutan Kota Balas Klumprik ingin dikelola dengan baik, dukungan kebijakan ini harus diiringi dengan kinerja yang jelas, transparan, dan akurat berdasarkan data lingkungan.

Atribut-atribut esensial dari tata kelola pariwisata berkelanjutan berpusat pada isu-isu hak asasi manusia terkait partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan kolaborasi dengan pihak-pihak lain (Teguh, 2024). Di mana pariwisata dapat dianggap memiliki manajemen yang baik, maka terdapat kerangka institusional yang mendorong kolaborasi dan kepemimpinan bersama di antara pihak-pihak yang berkolaborasi (Aminah *et al.*, 2021). Berbagai *stakeholder* memiliki peran masing-masing dalam mendukung pengelolaan pariwisata. Menurut (Djafar, 2024), Pemerintah menetapkan landasan melalui peraturan perundang-undangan yang berisi masyarakat berperan sebagai pelaksana proyek berbasis lokal, sektor swasta menjadi penggerak inovasi dan pendanaan, sementara akademisi melakukan penelitian dan memberikan dukungan. Perpaduan peran-peran ini

membuat destinasi lebih responsif dan mampu menghadapi tren socio-ekonomi global yang terus berubah.

Pengelolaan wisata hutan perkotaan seperti Balas Klumprik juga berkaitan dengan aspek lingkungan. Keberadaan vegetasi dan keanekaragaman hayati di kawasan ini menjadikannya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang berperan dalam menjaga kualitas lingkungan di wilayah perkotaan (Lestari & Wardani, 2021). Aktivitas pariwisata jika tidak diatur dengan baik, risiko degradasi lingkungan akan meningkat, misalnya kerusakan vegetasi, polusi, dan gangguan habitat hewan. Peran *stakeholder* dalam menjaga keseimbangan antara fungsi ekologi dan ekonomi sangat vital. *Stakeholder* harus berkomitmen untuk menciptakan kerangka kebijakan yang mendukung konsep kapasitas tampung lingkungan sebagai dasar pelaksanaan aktivitas pariwisata di kawasan tersebut (Santosa, 2023).

Pengembangan Hutan Kota Balas Klumprik secara lokal merupakan destinasi wisata yang dapat memberikan efek positif bagi komunitas sekitar. Aktivitas ekonomi komunitas melalui pariwisata, seperti penyewaan peralatan outdoor, kuliner lokal, dan produk kreatif berbasis lingkungan, dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi komunitas. Sesuai dengan temuan (Hidayat & Wulandari, 2022), partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi terkait pariwisata merupakan pendorong utama untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan memperdalam rasa tanggung jawab terhadap konservasi kawasan. Meskipun demikian, efek positif ini hanya dapat terwujud jika pengelolaan destinasi dilakukan dengan baik dan inklusif.

Hutan raya dari sudut pandang sosial merupakan ruang publik yang meningkatkan integrasi sosial masyarakat perkotaan. Aktivitas pariwisata berbasis alam memberikan peluang untuk interaksi sosial, kegiatan komunitas, dan kesadaran lingkungan (Sukmawati, 2020). Pengelolaan hutan kota tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial dan pendidikan bagi komunitas. Hutan Raya Balas Klumprik memiliki potensi sebagai laboratorium sosial dan ekologi terintegrasi yang mencakup rekreasi, pendidikan, dan konservasi.

Banyak yang telah dibahas dalam kerangka akademik mengenai peran *stakeholder* dalam pengelolaan destinasi. Namun, sedikit yang dibahas mengenai konteks pengelolaan hutan raya sebagai daya tarik wisata. Sebagian besar penelitian terfokus pada taman alam atau taman nasional, meskipun hutan raya memiliki karakteristik berbeda karena berada di kawasan perkotaan yang menghadapi tekanan sosial dan ekologi yang lebih besar (Hartono & Puspitasari, 2024). Penyelidikan tentang bagaimana *stakeholder* dapat membantu dalam pengelolaan Hutan Raya Balas Klumprik tidak hanya relevan sebagai sumber teori dalam tata kelola pariwisata perkotaan, tetapi juga sebagai dasar untuk pembentukan kebijakan lokal.

Berdasarkan gambaran yang diberikan, peran *stakeholder* dalam pengelolaan Hutan Raya Balas Klumprik tidak dapat diabaikan dalam upaya mempertahankan pengelolaan destinasi pariwisata lokal. Kerja sama antara pihak-pihak terkait merupakan kunci utama untuk pengelolaan yang sukses, yang harus didukung oleh kebijakan adaptif, partisipasi komunitas yang aktif, dan

kesadaran akan keberlanjutan lingkungan. Pemilihan Hutan Raya Balas Klumprik sebagai objek penelitian dikarenakan penulis memandang perlunya pengkajian mendalam mengenai tata kelola di kawasan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana pola interaksi antar-stakeholder tersebut terbentuk serta untuk mengidentifikasi hambatan koordinasi yang berpotensi menghambat keberlanjutan objek wisata.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dengan judul “Analisis Peran *Stakeholder* Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Hutan Raya Balas Klumprik di Surabaya”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana masing-masing *stakeholder* pemerintah daerah, pengelola, masyarakat lokal, wisatawan berperan dalam menjaga keberlanjutan destinasi wisata. Dalam penelitian ini, analisis peran *stakeholder* mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh (I. Nugroho, 2014) yang mengklasifikasikan peran *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata ke dalam lima kategori, yaitu *policy creator*, *coordinator*, *facilitator*, *implementer*, dan *accelerator*. Konsep tersebut digunakan untuk melihat bagaimana masing-masing *stakeholder* menjalankan perannya dalam proses pengelolaan kawasan wisata. Penelitian ini juga mengidentifikasi kolaborasi dalam proses koordinasi dan pengelolaan objek wisata Hutan Raya Balas Klumprik yang melibatkan berbagai *stakeholder*.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Menganalisis peran *stakeholder* dalam pengelolaan daya tarik wisata Hutan Raya Balas Klumprik Surabaya.

1.3.2 Mengidentifikasi kolaborasi antar *stakeholder* dalam pengelolaan destinasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

1. Memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkaya ilmu pengetahuan di bidang pariwisata, khususnya mengenai studi tata kelola destinasi pada objek wisata berbasis alam di lingkungan perkotaan.
2. Menjadi referensi empiris untuk penelitian sejenis pada hutan raya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai dinamika peran *stakeholder*, pola kolaborasi yang dikelola oleh pemerintah daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Membantu para pengelola dan masyarakat setempat memahami apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya untuk pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.
2. Sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam menyusun kebijakan tata kelola yang lebih terintegrasi guna menyelaraskan fungsi hutan raya dengan pemanfaatan area sebagai destinasi wisata publik.